



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 528 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU TAHUN 2016-2021**

BUPATI BERAU,

- Menimbang, : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Berau dan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat, : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Berau;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Berau;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 528 TAHUN 2017

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BERAU 2016-2021 PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016 -2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Penjelasan/Formula Penghitungan	Sumber Data	PenanggungJawab
MISI I : Membangun dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik Berkualitas, Adil, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan							
Tujuan 1: Menyediakan infrastruktur yang berkualitas							
1	Tersedianya pelayanan infrastruktur dasar	Cakupan Rumah Tangga Pengguna air bersih	Persen	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Luas kawasan kumuh	Hektar	Mengukur pelayanan terhadap wilayah permukiman yang terlayani dengan baik	Persentase luas wilayah permukiman kumu didapat dari perhitungan luas kawasan kumuh dibagi dengan luas wilayah yang berada diakabupaten	Informasi RP3KP	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tingkat Elektrifikasi	Persen	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah	Presentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	Memperbaiki kondisi jalan yang rusak	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 2: Mempertahankankualitaslingkunganhidup							
3	Terjaganya kualitas air sungai	Tingkat pencemaran air sungai: Sungai Segah, Sungai Kelay, Sungai Berau (IndeksPencemaran/IP<5)	Indeks Pencemaran	Pencegahan pencemaran air sungai	Perhitungan beban pencemaran air	Hasil laboratium pengujian air	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4	Terjaganya kualitas udara	Indeks standar pencemaran udara (Indeks Standar Pencemaran Udara/ISPU<100)	Indeks Pencemaran Udara	Pencegahan pencemaran udara	Perhitungan kualitas udara	Hasil laboratium pengujian udara	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

5	Menurunnya intensitas emisi	Tingkat Emisi karbon (ton CO ₂ eq)	Angka (ton CO ₂ eq)	Pembukaan lahan	Perhitungan emisi GRK	Laporan emisi gas rumah kaca	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Misi II : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam, Memberdayakan Usaha Ekonomi Kecil Menengah Yang Berbasis Kerakyatan, dan Perluasan Lapangan Kerja Termasuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata dan Kearifan Lokal							
Tujuan 3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat							
6	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	-	-	-	Bappeda/BPS
7	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran	%	-	-	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/BPS
8	Menurunnya indeks gini	Indeks Gini	%	Angka	-	-	BPS
9	Meningkatnya konsumsi rumah tangga	Pengeluaran Per Kapita	-	-	-	-	BPS
Tujuan 4. Mempertahankan kinerja ekonomi daerah							
10	Menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-	-	-	BPS
11	Meningkatnya pertumbuhan sector pertanian	Kontribusi sector pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	-	-	-	BPS
12	Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	%	-	-	-	Dinas Pertanian dan Peternakan
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sector pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Mengukur jumlah kunjungan wisata baik lokal maupun luar negeri	Data didapat dari laporan pemilik hotel, penginapan, dan home stay setiap bulan	Berdasarkan hasil data usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan	Hari	Mengukur jumlah kunjungan wisata baik lokal maupun luar negeri	Data didapat dari laporan pemilik hotel, penginapan, dan home stay setiap bulan	Berdasarkan hasil data usaha pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Misi III : Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Sehat, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi							
Tujuan 5. Meningkatkan kualitas SDM							
14	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	-	-	-	BAPEDA/BPS
15	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-Rata Lama sekolah	Tahun	-	-	-	Dinas Pendidikan

16	Meningkatnya usia harapan hidup	Angka Harapan Hidup	%	-	-	-	Dinas Keseha
MISI IV : Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel							
Tujuan 6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel							
17	Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	-	-	-	BPKAD
18	Meningkatnya Kualitas Layanan publik	Presentase SKPD yang berada di Zona Hijau Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	%	Mengukur kemampuan Perangkat Daerah dalam memberikanya pelayanan yang baik kepada masyarakat	Hasil Penilaian oleh Ombudsman	Hasil penilaian dari Ombudsman	Semua OPD
19	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur	Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Berau	Nilai/Predikat	Mengukur keberhasilan penerapan sistem SAKIP pemerintah Kab.Berau	Hasil Penilaian oleh Kemenpan RB terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Penilaian oleh Kemenpan RB	Bagian Organisasi, B ektorat dan s
20	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Pembangunan Desa	-	-	-	-	BPS/BPMPK


BUPATI BERAU
H. MUHARRAM